SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 107/KPN/SK.OT1.6/XII/2024

TENTANG

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1105/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 tentang Promosi Dan Mutasi Ketua Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum;
b. bahwa pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu dibentuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
10. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035 .
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142//DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
17. International Framework for Court Excellance/IFCE;
18. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit;
19. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
    ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG TIM SERTFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 94/KPN/SK.OT1.6/XI/2024 tanggal 25 November 2024, Tentang Tim Sertfikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk kembali dan menunjuk yang nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun.

KETIGA : Predikat sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terdiri atas :
1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup.

KEEMPAT : Pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) mengacu pada :
1. Pedoman sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Lembar Asesmen sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);

KELIMA : Tim Sertfikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Simalungun yang ditunjuk sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya senantiasa selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 18 Desember 2024

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 107/KPN/SK.OT1.6/XII/2024
Tanggal : 18 Desember 2024

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H, M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
	Tim Asesmen Internal		
1	Surtiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua	*Lead Assesor*
2	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.M.H	Hakim	*Assesor*
3	Widi Astuti, S.H.	Hakim	*Assesor*
4	Agung Cory F. D Laia, S.H., M.H.	Hakim	*Assesor*
5	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Hakim	*Assesor*
	Tim Survei		
1	Sinto Y Sitompul, S.H.	Panmud Hukum	Koordinator
2	Heni Gilbert Silalahi, S.H.	CPNS-Analis Perkara Peradilan	Sekretaris
3	Gabriella Aritonang, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
4	Sari Rahma Dewi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota
5	Miseri Domini Purba, S.H (Anggota)	CPNS-Analis Perkara Peradilan	Anggota
6	Rimbun R Avu Pasaribu, S.H. (Anggota)	PPNPN	Anggota
	Tim Dokumen Kontrol		
1	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator

2	Parlin Halomoan Harahap S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
3	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
4	Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
5	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7	Mona I Lumbansiantar, S.E	Kasub Bag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
8	Luky A Sebayang, S.Kom	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Nova Carolina Ginting, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota
10	Frenky A Tampubolon, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota
11	Ardila Winarti, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Patricia Y Lumbantobing, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN